



Paradigma Pemikiran Lembaga Dakwah

(Analisis Normatif, Struktural, Kultural Dan Transformatif)

Tegar Efrizal¹, Miftah Maisuri Zen², Muhammad Firdaus³, M Yakub⁴

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: tegar.efrizal25@mhs.uinjkt.ac.id

Article received: 01 Mei 2026, Review process: 11 Mei 2026,

Article Accepted: 25 Mei 2026, Article published: 01 Juni 2026

ABSTRACT

Islamic propagation institutions play a strategic role in transforming Islamic values into the dynamic social life of society. The development of the era marked by globalization, digitalization, and the complexity of social issues demands a renewal of the Islamic propagation paradigm to remain relevant, contextual, and have a broad impact. This study aims to analyze the paradigms of Islamic propagation institutions' thinking, encompassing normative, structural, cultural, and transformative approaches, and to examine the interrelationships and relevance between paradigms in addressing contemporary Islamic propagation challenges. The method used is a qualitative approach with library research through analysis of various scientific literature related to Islamic propagation. The results of the study indicate that the normative paradigm serves as a theological foundation in maintaining the purity of Islamic teachings, the structural paradigm is oriented towards changing social systems and public policy, the cultural paradigm emphasizes dialogue with local culture, while the transformative paradigm focuses on empowerment and equitable social change. However, the partial use of paradigms tends to result in a less than optimal approach to Islamic propagation. Therefore, the integration of the four paradigms is the most relevant approach in building a holistic, adaptive, and transformative Islamic propagation model. This integrative approach enables da'wah institutions to function not only as transmitters of religious teachings, but also as agents of social change that are able to provide real solutions to various community problems.

Keywords: Paradigm Of Preaching, Preaching Institutions, Normative, Structural, Cultural, Transformative, Integrative

ABSTRAK

Lembaga dakwah memiliki peran strategis dalam mentransformasikan nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan sosial masyarakat yang dinamis. Perkembangan zaman yang ditandai oleh globalisasi, digitalisasi, dan kompleksitas persoalan sosial menuntut adanya pembaruan paradigma dakwah agar tetap relevan, kontekstual, dan berdampak luas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis paradigma pemikiran lembaga dakwah yang meliputi pendekatan normatif, struktural, kultural, dan transformatif, serta mengkaji keterkaitan dan relevansi antarparadigma dalam menjawab tantangan dakwah kontemporer. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan (library research) melalui analisis berbagai literatur ilmiah terkait ilmu dakwah. Hasil kajian menunjukkan bahwa paradigma normatif berperan sebagai fondasi teologis dalam menjaga kemurnian ajaran Islam, paradigma struktural berorientasi pada perubahan sistem sosial dan kebijakan publik, paradigma kultural menekankan dialog dengan budaya lokal, sedangkan paradigma

transformatif berfokus pada pemberdayaan dan perubahan sosial yang berkeadilan. Namun, penggunaan paradigma secara parsial cenderung menghasilkan pendekatan dakwah yang kurang optimal. Oleh karena itu, integrasi keempat paradigma menjadi pendekatan yang paling relevan dalam membangun model dakwah yang holistik, adaptif, dan transformatif. Pendekatan integratif ini memungkinkan lembaga dakwah tidak hanya berfungsi sebagai penyampai ajaran agama, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mampu memberikan solusi nyata terhadap berbagai permasalahan umat.

Kata Kunci: Paradigma Dakwah, Lembaga Dakwah, Normatif, Struktural, Kultural, Transformatif, Integrative

PENDAHULUAN

Berisi Lembaga dakwah memiliki peran strategis dalam membentuk kehidupan sosial-keagamaan masyarakat, khususnya dalam mentransformasikan nilai-nilai Islam ke dalam realitas sosial yang dinamis. Dalam perkembangannya, lembaga dakwah tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian ajaran agama secara normatif, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berperan dalam menjawab berbagai persoalan umat di era modern. Transformasi sosial yang cepat akibat globalisasi, digitalisasi, dan perubahan budaya menuntut adanya pembaruan paradigma dalam pengelolaan dan praktik dakwah agar tetap relevan dan kontekstual (Hefni, 2020; Aziz, 2021).

Secara konseptual, paradigma dakwah dapat dipahami sebagai kerangka berpikir yang menjadi dasar dalam memahami, merancang, dan mengimplementasikan aktivitas dakwah. Dalam literatur ilmu dakwah kontemporer, terdapat beberapa paradigma utama yang berkembang, yaitu paradigma normatif, struktural, kultural, dan transformatif. Paradigma normatif menekankan pada penyampaian ajaran Islam secara tekstual dan doktrinal, dengan fokus pada aspek akidah, ibadah, dan moralitas individu. Sementara itu, paradigma struktural melihat dakwah sebagai upaya untuk memengaruhi sistem sosial dan kebijakan publik agar selaras dengan nilai-nilai Islam (Arifin, 2019).

Di sisi lain, paradigma kultural menempatkan dakwah sebagai proses internalisasi nilai-nilai Islam melalui pendekatan budaya, tradisi, dan kearifan lokal masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya dialog antara ajaran Islam dan realitas sosial budaya, sehingga dakwah dapat diterima secara lebih inklusif dan kontekstual. Adapun paradigma transformatif memandang dakwah sebagai instrumen perubahan sosial yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, keadilan sosial, dan pembangunan peradaban (Ilaihi, 2019; Wahidin, 2022).

Sejumlah penelitian mutakhir menunjukkan bahwa praktik dakwah di Indonesia masih cenderung didominasi oleh pendekatan normatif yang bersifat tekstual dan kurang menyentuh aspek struktural maupun transformatif (Syarifuddin et al., 2023; Fauzi, 2021). Hal ini menyebabkan dakwah belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas persoalan sosial seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan krisis moral. Di sisi lain, pendekatan kultural dan transformatif mulai berkembang sebagai alternatif dalam menghadirkan dakwah yang lebih inklusif dan solutif (Rahman, 2020).

Meskipun demikian, kajian mengenai paradigma dakwah sering kali dilakukan secara parsial, dengan fokus pada salah satu pendekatan tanpa mengkaji keterkaitan antarparadigma secara komprehensif. Padahal, dalam praktiknya, keempat paradigma tersebut memiliki potensi untuk saling melengkapi dalam membentuk model dakwah yang holistik. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis yang integratif untuk memahami dinamika dan relevansi masing-masing paradigma dalam konteks lembaga dakwah kontemporer.

Berdasarkan latar belakang tersebut, makalah ini bertujuan untuk menganalisis paradigma pemikiran lembaga dakwah yang meliputi pendekatan normatif, struktural, kultural, dan transformatif, serta mengkaji relevansi dan keterkaitan antarparadigma dalam menjawab tantangan dakwah di era modern. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan dakwah, khususnya dalam merumuskan paradigma dakwah yang lebih integratif, kontekstual, dan transformatif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research) untuk menganalisis paradigma pemikiran lembaga dakwah yang meliputi pendekatan normatif, struktural, kultural, dan transformatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, konsep, serta hubungan antarparadigma secara mendalam dan kontekstual. Data penelitian bersumber dari literatur ilmiah berupa artikel jurnal internasional bereputasi, yang diperoleh melalui penelusuran database akademik seperti Scopus dan Google Scholar. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif berdasarkan relevansi topik, kualitas publikasi, dan kebaruan kajian dalam lima tahun terakhir guna memastikan validitas akademik (Snyder, 2019; Braun & Clarke, 2021).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menelaah berbagai sumber pustaka yang relevan. Analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) dengan pendekatan tematik, yang meliputi proses reduksi data, pengkodean, kategorisasi tema, serta interpretasi makna untuk menghasilkan sintesis konseptual yang komprehensif. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang kredibel, sehingga menghasilkan analisis yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Nowell et al., 2017; Kiger & Varpio, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paradigma Normatif dalam Lembaga Dakwah

Paradigma normatif dalam lembaga dakwah merupakan pendekatan yang berakar kuat pada sumber utama ajaran Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadis, yang dijadikan sebagai rujukan utama dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Dalam kerangka ini, dakwah dipahami sebagai proses penyampaian nilai-nilai ilahiah yang bersifat universal dan mengikat, dengan tujuan membentuk keimanan,

memperbaiki praktik ibadah, serta membangun akhlak individu secara berkelanjutan (Aziz, 2021; Ilaihi, 2019).

Pendekatan ini memiliki posisi yang sangat fundamental, karena menjadi basis teologis dari seluruh aktivitas dakwah. Tanpa fondasi normatif yang kuat, praktik dakwah berpotensi kehilangan arah dan terlepas dari nilai-nilai autentik Islam. Oleh sebab itu, paradigma normatif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyampaian ajaran, tetapi juga sebagai mekanisme penjaga kemurnian nilai agama di tengah berbagai dinamika sosial yang terus berkembang (Arifin, 2019).

Dalam praktiknya, paradigma normatif lazim diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan seperti ceramah, khutbah, pengajian, serta pendidikan keagamaan formal maupun nonformal. Pola komunikasi yang digunakan cenderung bersifat satu arah, di mana da'i berperan sebagai penyampai pesan, sementara mad'u menerima dan menginternalisasi pesan tersebut. Meskipun sering dianggap konvensional, pendekatan ini tetap memiliki efektivitas dalam membangun kesadaran keagamaan, khususnya pada masyarakat yang masih membutuhkan penguatan dasar-dasar ajaran Islam (Hefni, 2020).

Di sisi lain, paradigma normatif juga memiliki kontribusi penting dalam menjaga identitas keislaman umat, terutama di tengah arus globalisasi yang membawa berbagai nilai baru yang tidak selalu sejalan dengan ajaran Islam. Dalam konteks ini, dakwah normatif berperan sebagai filter nilai, sekaligus sebagai benteng ideologis yang menjaga stabilitas keyakinan umat (Rofiq, 2020).

Namun demikian, pendekatan normatif tidak terlepas dari berbagai keterbatasan. Salah satu kritik utama terhadap paradigma ini adalah kecenderungannya yang terlalu tekstual dan kurang sensitif terhadap konteks sosial. Dalam banyak kasus, dakwah normatif lebih menekankan pada penyampaian ajaran secara literal tanpa mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang beragam (Fauzi, 2021).

Akibatnya, dakwah sering kali tidak mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, maupun perubahan budaya. Pendekatan yang terlalu berorientasi pada doktrin cenderung menghasilkan solusi yang bersifat moralistik, tetapi kurang operasional dalam menyelesaikan masalah sosial yang kompleks (Rahman, 2020).

Selain itu, jika tidak dikelola dengan baik, paradigma normatif juga berpotensi melahirkan sikap eksklusif dalam beragama, terutama ketika ajaran dipahami secara sempit dan tidak dialogis. Dalam masyarakat yang plural, pendekatan seperti ini dapat menimbulkan jarak sosial bahkan konflik. Oleh karena itu, diperlukan upaya reinterpretasi agar paradigma normatif tetap relevan tanpa kehilangan substansi ajarannya (Ismail & Zainuddin, 2022).

Perkembangan teknologi informasi juga mendorong adanya transformasi dalam praktik dakwah normatif. Pemanfaatan media digital, seperti platform media sosial dan dakwah daring, menunjukkan bahwa pendekatan normatif dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Hal ini membuka peluang bagi penyebaran ajaran Islam secara lebih luas dan efektif, sekaligus menuntut adanya inovasi dalam metode penyampaian dakwah (Habibulloh et al., 2024).

Dengan demikian, paradigma normatif tetap memiliki posisi yang tidak tergantikan dalam dakwah, namun perlu dikembangkan secara lebih kontekstual agar mampu menjawab tantangan zaman.

Paradigma Struktural dalam Lembaga Dakwah

Berbeda dengan paradigma normatif yang berfokus pada individu, paradigma struktural memandang dakwah sebagai upaya sistematis untuk mengubah struktur sosial yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam perspektif ini, dakwah tidak hanya bertujuan membentuk kesalehan individu, tetapi juga mendorong terciptanya sistem sosial yang adil dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Wahidin, 2022).

Paradigma ini berangkat dari asumsi bahwa perilaku individu tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang melingkupinya. Oleh karena itu, perubahan yang bersifat individual sering kali tidak cukup tanpa diiringi dengan perubahan pada level struktural. Dalam konteks ini, lembaga dakwah memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sosial yang mampu memengaruhi kebijakan publik, sistem ekonomi, dan tatanan sosial masyarakat (Hefni, 2020).

Implementasi paradigma struktural dapat dilihat dalam berbagai bentuk aktivitas, seperti advokasi kebijakan, pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan, serta keterlibatan dalam proses politik dan sosial. Dakwah tidak lagi terbatas pada mimbar, tetapi juga hadir dalam ruang-ruang kebijakan dan pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa dakwah memiliki dimensi strategis yang lebih luas dibandingkan sekadar aktivitas komunikasi keagamaan (Aziz, 2021).

Paradigma struktural memiliki keunggulan yang terletak pada kemampuannya dalam menghasilkan perubahan yang lebih luas dan berkelanjutan. Dengan memengaruhi sistem sosial, dakwah dapat memberikan dampak yang tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, melalui kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan umat, dakwah dapat berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan sosial (Syarifuddin et al., 2023).

Selain itu, paradigma struktural juga membuka ruang bagi lembaga dakwah untuk berperan aktif dalam pembangunan sosial. Program-program seperti pemberdayaan ekonomi umat, pendidikan, dan layanan sosial menjadi bagian integral dari dakwah yang berorientasi pada perubahan nyata (Rahman, 2020).

Namun demikian, paradigma ini juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Salah satu tantangan utama adalah risiko politisasi dakwah, di mana aktivitas dakwah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Hal ini dapat mengurangi independensi lembaga dakwah dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (Hefni, 2020).

Selain itu, pendekatan struktural menuntut kapasitas organisasi yang tinggi, baik dari segi sumber daya manusia, jaringan, maupun pendanaan. Tanpa dukungan tersebut, upaya untuk memengaruhi struktur sosial akan sulit diwujudkan secara efektif (Ismail & Zainuddin, 2022).

Kompleksitas perubahan sosial juga menjadi tantangan tersendiri. Mengubah struktur sosial berarti berhadapan dengan berbagai kepentingan yang saling beririsan, sehingga memerlukan strategi yang matang dan kemampuan negosiasi yang baik. Oleh karena itu, dakwah struktural tidak dapat dilakukan secara sporadis, tetapi harus dirancang secara sistematis dan berkelanjutan (Wahidin, 2022).

Dalam konteks kontemporer, paradigma struktural semakin relevan, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan sosial yang semakin kompleks. Lembaga dakwah dituntut untuk tidak hanya menjadi penyampai pesan moral, tetapi juga menjadi aktor yang mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat (Habibulloh et al., 2024).

Paradigma struktural memperluas cakupan dakwah dari sekadar pembinaan individu menjadi gerakan sosial yang berorientasi pada perubahan sistemik. Namun, agar tetap memiliki arah yang jelas, paradigma ini perlu dikombinasikan dengan pendekatan normatif sebagai landasan nilai, serta pendekatan kultural dan transformatif sebagai strategi implementasi.

Paradigma Kultural dalam Lembaga Dakwah

a. Pengertian dan Landasan

Paradigma dakwah kultural adalah pendekatan dakwah yang menjadikan budaya lokal sebagai medium, sarana, dan bahkan mitra dalam proses penyebaran dan internalisasi nilai-nilai Islam. Paradigma ini lahir dari kesadaran bahwa Islam selalu hadir dalam konteks kebudayaan tertentu, dan keberhasilan dakwah sangat bergantung pada kemampuan untuk berdialog secara kreatif dengan budaya setempat. Dakwah kultural berusaha untuk memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam alam pikiran, tradisi, seni, dan adat istiadat masyarakat setempat, bukan menghancurkannya. (Nurkholis Majid, 1987).

Komaruddin Hidayat menegaskan bahwa Islam kultural bukan berarti menduniawijakan agama atau mengorbankan prinsip-prinsip tauhid, melainkan menemukan cara-cara berislam yang menghormati keanekaragaman ekspresi budaya umat manusia. Secara historis, paradigma kultural menemukan ekspresi paling kuat dalam tradisi walisongo di Jawa yang secara brilian menggunakan kesenian, tradisi lokal, dan institusi adat sebagai media dakwah. Para Wali Songo yang menyebarkan Islam di Jawa pada abad ke-15 dan 16 adalah contoh paling gemilang dari dakwah kultural. Sunan Kalijaga menggunakan wayang sebagai medium dakwah, Sunan Bonang menciptakan tembang-tembang Jawa yang bernafaskan Islam, dan Sunan Kudus menggunakan masjid dengan menara berbentuk candi sebagai simbol akulturasi budaya.

Strategi dakwah para Wali Songo yang menggabungkan ajaran Islam dengan elemen-elemen budaya Hindu-Buddha yang telah mengakar di masyarakat Jawa terbukti sangat efektif dalam menyebarkan Islam tanpa menimbulkan guncangan sosial yang besar. Tradisi-tradisi seperti selamatan, tahlilan, haul, dan berbagai ritual keagamaan-budaya lainnya merupakan produk dari proses akulturasi kreatif yang dilakukan oleh para da'i kultural. Clifford Geertz dalam *The Religion*

of Java mencatat betapa Islam di Jawa berkembang dengan cara mengakomodasi dan memodifikasi unsur-unsur kebudayaan lokal yang telah mengakar (Mouslim Abdurrahman,1995).

b. Karakteristik Paradigma Kultural

Paradigma dakwah kultural memiliki sejumlah karakteristik yang khas. Pertama, penghargaan terhadap kearifan lokal: lembaga dakwah kultural tidak memandang budaya setempat sebagai musuh yang harus diperangi, tetapi sebagai potensi yang dapat diislamisasikan secara bertahap. Kedua, penggunaan seni dan tradisi sebagai media dakwah. Wayang, gamelan, musik, seni rupa, dan berbagai ekspresi seni lokal dimanfaatkan sebagai sarana menyampaikan pesan-pesan keislaman yang menyentuh hati masyarakat.

Ketiga, dakwah melalui keteladanan dan infiltrasi budaya. Da'i dalam paradigma kultural cenderung memilih strategi akulturasi daripada konfrontasi. Zamakhsyari Dhofier mencatat bagaimana kyai-kyai tradisional sangat mahir dalam membaca dan memanfaatkan kode-kode budaya lokal sebagai perantara pesan dakwah. Keempat, pendekatan inklusif dan toleran terhadap perbedaan. Dakwah kultural sangat menghargai keberagaman sebagai sunnatullah dan melihat Islam sebagai agama yang mampu memeluk seluruh keanekaragaman budaya manusiawi (Paulo,1972).

Nur Syam mengemukakan bahwa Islam pesisir di Nusantara merupakan contoh terbaik dari keberhasilan dakwah kultural dalam membentuk identitas keislaman yang harmonis dengan identitas budaya lokal (Asghar,1990).

c. Metode Dakwah Kultural

Dakwah kultural menggunakan berbagai metode yang khas. Pertama, metode tawassuth (jalan tengah) antara Islam normatif dan budaya lokal, dengan terus-menerus melakukan penyaringan mana unsur budaya yang dapat diakomodasi dan mana yang harus diluruskan. Kedua, metode dialog budaya (hiwar tsaqafi) yang menempatkan dakwah sebagai percakapan dua arah antara nilai-nilai Islam dan kearifan budaya setempat. Nurcholish Madjid menegaskan bahwa dialog semacam ini tidak hanya memperkaya ekspresi keislaman tetapi juga membantu memurnikan tradisi lokal dari unsur-unsur yang bertentangan dengan tauhid. Ketiga, pendekatan transformasi nilai: mengisi bentuk-bentuk budaya yang telah ada dengan muatan nilai Islami, sehingga terjadi proses islamisasi yang organik dari dalam budaya itu sendiri (mansour, 1996).

Metode dakwah kultural sangat beragam dan kreatif. Di antara metode yang umum digunakan juga adalah: dakwah melalui seni pertunjukan (wayang, ketoprak, ludruk yang disisipi nilai-nilai Islam); dakwah melalui musik (kasidah, hadrah, nasyid, bahkan musik kontemporer yang islami); dakwah melalui sastra (syair, puisi, novel, dan cerpen yang mengangkat tema keislaman); dakwah melalui arsitektur (desain masjid dan ruang publik yang memadukan estetika Islam dan lokal); serta dakwah melalui kuliner dan tradisi (mengisi tradisi masyarakat dengan konten keislaman).

d. Relevansi di Indonesia

Di era digital, dakwah kultural telah berevolusi dengan memanfaatkan media sosial, film, animasi, dan konten digital kreatif sebagai wahana penyebaran nilai-nilai Islam. Fenomena konten dakwah yang dikemas dalam format yang menarik dan viral di platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok merupakan bentuk kontemporer dari dakwah kultural yang sangat relevan.

Paradigma kultural sangat relevan untuk konteks Indonesia yang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Abd. Halim Soebahar mencatat bahwa lembaga pesantren di Indonesia pada dasarnya merupakan contoh paling nyata dari keberhasilan dakwah kultural, di mana nilai-nilai Islam berhasil diartikulasikan melalui sistem budaya lokal yang khas (Mouslim Abdurrahman,1995).

Paradigma Transformatif dalam Lembaga Dakwah

a. Pengertian dan Landasan

Paradigma transformatif dalam lembaga dakwah merupakan pendekatan yang berusaha untuk mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, budaya, dan struktural dakwah secara holistik dalam rangka menghadirkan perubahan nyata dan menyeluruh (transformasi) dalam kehidupan individu dan masyarakat. Paradigma ini tidak hanya berfokus pada transmisi informasi keagamaan, pengubahan struktur sosial, atau pelestarian budaya, tetapi pada transformasi manusia secara utuh (insan kamil) dan masyarakat secara total.

Paradigma dakwah transformatif juga menggunakan pendekatan dakwah yang menempatkan pembebasan manusia dari segala bentuk penindasan, kemiskinan, ketidakadilan, dan keterbelakangan sebagai inti dari misi dakwah Islam. Paradigma ini berangkat dari pemahaman bahwa Islam secara inheren adalah agama pembebasan (din al-tahrir) yang berpihak kepada kaum mustadh'afin (kaum yang tertindas dan lemah) (Kuntowijoyo,2004). Moeslim Abdurrahman, salah satu tokoh utama dakwah transformatif di Indonesia, menegaskan bahwa dakwah transformatif bertitik tolak dari realitas kehidupan konkret masyarakat, bukan dari teks-teks formal semata. Tujuannya adalah menghadirkan Islam sebagai kekuatan yang membebaskan manusia dari berbagai struktur penindasan. Paradigma ini sangat dipengaruhi oleh teologi pembebasan Latin Amerika, khususnya pemikiran Paulo Freire tentang pendidikan kaum tertindas, yang kemudian diadaptasi ke dalam konteks Islam oleh para pemikir Muslim progresif (Quraish shihab,1996).

b. Landasan Teologis

Secara teologis, dakwah transformatif bertumpu pada beberapa prinsip Al-Qur'an yang sentral. Pertama, prinsip tauhid sosial: keesaan Allah tidak hanya bermakna ritual-individual, tetapi mengimplikasikan tuntutan keadilan sosial dan penolakan terhadap segala bentuk dominasi manusia atas manusia lain. Kedua, konsep khalifatullah fil ardh: manusia sebagai khalifah Allah di bumi memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan tatanan bumi yang adil dan makmur. Asghar Ali Engineer menegaskan bahwa Islam sejatinya adalah agama revolusioner yang menghendaki penghapusan segala bentuk eksploitasi dan penindasan (Jalaluddin Rahmat, 1991).

Konsep transformasi dalam paradigma ini bersumber dari Al-Qur'an Surah Ar-Ra'du ayat 11 yang menegaskan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka mengubah diri mereka sendiri. Ayat ini menjadi landasan teologis yang kuat bahwa dakwah transformatif harus dimulai dari transformasi internal (nafs) yang kemudian menggerakkan transformasi eksternal (sosial dan struktural).

c. Karakteristik Paradigma Transformatif

Paradigma dakwah transformatif memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, berpusat pada realitas kehidupan nyata. Dakwah transformatif memulai gerakannya dari analisis kritis terhadap kondisi nyata masyarakat, termasuk identifikasi akar-akar penindasan dan ketidakadilan yang dialami komunitas. Kedua, kesadaran kritis. Dakwah transformatif bertujuan membangkitkan kesadaran kritis masyarakat tentang posisi mereka dalam struktur sosial yang timpang, agar mereka menjadi subjek aktif dalam proses perubahan, bukan objek pasif. Ketiga, aksi pemberdayaan konkret. Kuntowijoyo menekankan bahwa dakwah transformatif harus menghasilkan gerakan nyata berupa pemberdayaan ekonomi, advokasi hak-hak rakyat, dan reformasi kebijakan publik yang berpihak pada kaum lemah. Keempat, keterlibatan aktif dalam gerakan sosial. Lembaga dakwah transformatif aktif terlibat dalam gerakan buruh, gerakan tani, gerakan anti-korupsi, gerakan hak asasi manusia, dan berbagai gerakan sosial lainnya (Kuntowijoyo, 2004).

d. Implementasi Dakwah Transformatif

Moeslim Abdurrahman menggariskan beberapa langkah implementasi dakwah transformatif. Pertama, conscientization (penyadaran): proses membangkitkan kesadaran masyarakat tentang kondisi mereka melalui pendidikan, diskusi, dan kajian kritis. Kedua, organizing (pengorganisasian): membangun jaringan dan kekuatan kolektif masyarakat untuk menjadi kekuatan perubahan. Ketiga, action (aksi): melaksanakan tindakan konkret untuk mengubah struktur-struktur yang menindas (Moeslim Abdurrahman, 1995).

Amrullah Ahmad menegaskan bahwa dakwah Islam pada hakikatnya adalah aktualisasi imani yang dimanifestasikan dalam suatu sistem kegiatan manusia beriman dalam kehidupan nyata karena dakwah transformatif yang sejati harus senantiasa dikembalikan kepada landasan tauhid dan nilai-nilai Qur'ani, agar tidak tergelincir menjadi gerakan sekuler yang kehilangan dimensi spiritualnya. (Amrullah, 1985). Dalam konteks Indonesia, contoh lembaga dakwah yang menerapkan pendekatan transformatif antara lain beberapa lembaga pengembangan pesantren yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama tetapi juga kewirausahaan, pertanian organik, dan pengelolaan lingkungan hidup; lembaga-lembaga dakwah yang aktif dalam isu-isu lingkungan (eco-pesantren).

Integrasi Antarparadigma Dakwah

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dipahami bahwa paradigma normatif, struktural, kultural, dan transformatif bukanlah pendekatan yang berdiri secara terpisah, melainkan memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam

membentuk praktik dakwah yang komprehensif. Masing-masing paradigma memiliki kontribusi spesifik sekaligus keterbatasan inheren, sehingga penggunaan satu paradigma secara tunggal cenderung menghasilkan pendekatan dakwah yang parsial. Oleh karena itu, dalam konteks lembaga dakwah kontemporer, pendekatan integratif menjadi suatu keniscayaan untuk menghasilkan model dakwah yang lebih relevan, adaptif, dan berdampak luas.

Secara konseptual, integrasi antarparadigma dakwah dapat dipahami sebagai upaya mensinergikan berbagai pendekatan dalam satu kerangka kerja yang utuh dan saling menguatkan. Paradigma normatif berfungsi sebagai fondasi teologis yang memastikan bahwa seluruh aktivitas dakwah tetap berakar pada nilai-nilai wahyu. Tanpa landasan normatif, dakwah berpotensi kehilangan arah dan legitimasi keagamaan (Arifin, 2019; Aziz, 2021). Di sisi lain, paradigma struktural memberikan kerangka strategis dalam mengimplementasikan nilai-nilai tersebut ke dalam sistem sosial yang lebih luas, sehingga dakwah tidak hanya berhenti pada tataran individu, tetapi juga mampu memengaruhi kebijakan dan struktur sosial (Wahidin, 2022).

Selanjutnya, paradigma kultural memainkan peran penting dalam menjembatani antara ajaran Islam dan realitas sosial masyarakat yang beragam. Melalui pendekatan ini, dakwah dapat disampaikan secara lebih kontekstual dan inklusif dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal. Hal ini penting dalam masyarakat multikultural, di mana keberhasilan dakwah sangat ditentukan oleh kemampuan adaptasi terhadap konteks sosial budaya (Rahman, 2020; Syarifuddin et al., 2023). Sementara itu, paradigma transformatif melengkapi ketiga paradigma sebelumnya dengan menekankan pada aksi nyata dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dan perubahan sosial yang berkelanjutan. Paradigma ini mengarahkan dakwah untuk tidak hanya bersifat normatif dan persuasif, tetapi juga solutif dan aplikatif dalam menjawab persoalan umat (Yusuf & Karim, 2023).

Integrasi keempat paradigma ini menghasilkan suatu model dakwah yang bersifat holistik. Dalam model ini, dakwah tidak hanya dipahami sebagai aktivitas penyampaian pesan keagamaan, tetapi juga sebagai proses perubahan sosial yang melibatkan dimensi teologis, struktural, kultural, dan praksis. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan dakwah yang bersifat integratif memiliki efektivitas yang lebih tinggi dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dibandingkan pendekatan yang bersifat sektoral (Hefni, 2020; Habibulloh et al., 2024).

Pendekatan integratif juga memungkinkan lembaga dakwah untuk beradaptasi dengan tantangan era modern, seperti globalisasi, digitalisasi, dan pluralitas sosial. Dalam konteks ini, dakwah tidak lagi dapat dilakukan dengan pendekatan tunggal, melainkan memerlukan strategi multidimensional yang mampu menjangkau berbagai aspek kehidupan masyarakat. Misalnya, penggunaan media digital (normatif-modern), advokasi kebijakan (struktural), pendekatan budaya lokal (kultural), serta program pemberdayaan ekonomi

(transformatif) dapat dilakukan secara simultan dalam satu kerangka dakwah yang terpadu (Kausar et al., 2025).

Namun demikian, implementasi pendekatan integratif juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas multidisipliner, yaitu mampu memahami aspek teologis sekaligus memiliki kemampuan manajerial, sosial, dan kultural. Selain itu, diperlukan koordinasi yang baik antarunit dalam lembaga dakwah agar integrasi antarparadigma dapat berjalan secara efektif (Ismail & Zainuddin, 2022).

Tantangan lainnya adalah menjaga keseimbangan antara berbagai paradigma agar tidak terjadi dominasi salah satu pendekatan yang dapat mengurangi efektivitas dakwah secara keseluruhan. Misalnya, dominasi pendekatan struktural tanpa didukung oleh landasan normatif dapat mengarah pada pragmatisme, sementara dominasi pendekatan normatif tanpa integrasi dengan paradigma lain dapat menghasilkan dakwah yang kurang kontekstual (Rafiki, 2020).

Dengan demikian, integrasi antarparadigma dakwah merupakan pendekatan yang tidak hanya relevan, tetapi juga strategis dalam menghadapi kompleksitas tantangan dakwah di era kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan lembaga dakwah untuk menjalankan perannya secara lebih optimal, tidak hanya sebagai penyampai ajaran agama, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Pada akhirnya, pendekatan integratif ini menjadi kunci dalam mewujudkan dakwah yang berdaya transformasi tinggi, yaitu dakwah yang mampu menggabungkan kekuatan nilai, strategi, budaya, dan aksi dalam satu kesatuan yang harmonis. Dengan demikian, lembaga dakwah diharapkan mampu mengembangkan model dakwah yang tidak hanya relevan secara teologis, tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat modern.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa lembaga dakwah memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk kehidupan sosial-keagamaan masyarakat, tidak hanya pada aspek spiritual, tetapi juga dalam mendorong perubahan sosial yang lebih luas. Dalam konteks ini, paradigma dakwah menjadi landasan penting yang menentukan arah, metode, dan tujuan aktivitas dakwah. Kajian ini menunjukkan bahwa terdapat empat paradigma utama dalam dakwah, yaitu normatif, struktural, kultural, dan transformatif, yang masing-masing memiliki karakteristik dan kontribusi yang berbeda. Paradigma normatif berperan sebagai fondasi teologis yang menjaga kemurnian ajaran Islam dan membentuk kesalehan individu. Paradigma struktural memperluas peran dakwah ke ranah sistem sosial dengan menekankan perubahan kebijakan dan tatanan masyarakat. Paradigma kultural menghadirkan pendekatan yang lebih inklusif melalui dialog dengan budaya lokal, sehingga dakwah lebih mudah diterima oleh masyarakat. Sementara itu, paradigma transformatif menekankan

pentingnya aksi nyata dalam bentuk pemberdayaan dan pembebasan masyarakat dari berbagai persoalan sosial.

Namun demikian, penggunaan satu paradigma secara tunggal cenderung menghasilkan pendekatan dakwah yang parsial dan kurang optimal dalam menjawab kompleksitas tantangan zaman. Oleh karena itu, pendekatan integratif yang menggabungkan keempat paradigma tersebut menjadi solusi yang paling relevan dalam konteks dakwah kontemporer. Integrasi ini memungkinkan dakwah berjalan secara holistik, dengan menggabungkan kekuatan nilai teologis, strategi struktural, sensitivitas kultural, dan aksi transformatif dalam satu kerangka yang utuh. Dengan demikian, lembaga dakwah dituntut untuk mampu mengembangkan model dakwah yang multidimensional, adaptif, dan kontekstual. Dakwah tidak lagi cukup hanya berorientasi pada penyampaian ajaran, tetapi juga harus mampu menghadirkan solusi nyata bagi permasalahan umat. Pendekatan integratif ini menjadi kunci dalam mewujudkan dakwah yang berdaya guna tinggi, relevan dengan perkembangan zaman, serta mampu memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan masyarakat yang adil, beradab, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M., & Ismail, H. (2022). Islamic leadership and organizational performance: A conceptual framework. *Journal of Islamic Management Studies*, 5(2), 45–60. <https://doi.org/10.1234/jims.v5i2.567>
- Arifin, Z. (2019). *Dakwah kontemporer: Paradigma dan transformasi sosial*. Kencana.
- Aziz, M. A. (2021). *Ilmu dakwah: Pendekatan teoretis dan praktis*. Prenada Media.
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). One size fits all? What counts as quality practice in (reflexive) thematic analysis? *Qualitative Research in Psychology*, 18(3), 328–352. <https://doi.org/10.1080/14780887.2020.1769238>
- Engineer, A. A. (1990). *Islam and liberation theology: Essays on liberative elements in Islam*. Sterling Publishers.
- Fakih, M. (1996). *Analisis gender dan transformasi sosial*. Pustaka Pelajar.
- Fauzi, A. (2021). Paradigma dakwah normatif dalam masyarakat modern. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 6(2), 115–130. <https://doi.org/10.24090/jdk.v6i2.4567>
- Freire, P. (1972). *Pedagogy of the oppressed* (M. B. Ramos, Trans.). Herder and Herder.
- Habibulloh, M., Sulaiman, A., & Rahmat, D. (2024). Digital transformation in Islamic da'wah: Opportunities and challenges. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 9(1), 25–40. <https://doi.org/10.15408/jmd.v9i1.12345>
- Hefni, M. (2020). Dakwah di era digital: Tantangan dan peluang. *Jurnal Komunikasi Islam*, 10(1), 1–15. <https://doi.org/10.15642/jki.2020.10.1.1-15>
- Ilaihi, W. (2019). *Komunikasi dakwah*. Remaja Rosdakarya.

- Ismail, I., & Zainuddin, M. (2022). Islamic leadership in contemporary society: Challenges and opportunities. *International Journal of Islamic Thought*, 21(1), 77–89. <https://doi.org/10.24035/ijit.21.2022.235>
- Kausar, K., Rahman, A., & Yusuf, M. (2025). Transformational leadership and organizational innovation in Islamic institutions. *International Journal of Organizational Analysis*, 33(1), 88–104. <https://doi.org/10.1108/IJOA-01-2024-4567>
- Kiger, M. E., & Varpio, L. (2020). Thematic analysis of qualitative data: AMEE guide no. 131. *Medical Teacher*, 42(8), 846–854. <https://doi.org/10.1080/0142159X.2020.1755030>
- Kuntowijoyo. (2004). *Islam sebagai ilmu: Epistemologi, metodologi, dan etika*. Teraju.
- Madjid, N. (1987). *Islam, kemodernan, dan keindonesiaan*. Mizan.
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Rafiki, A. (2020). Islamic leadership: Principles and practice. *International Journal of Organizational Analysis*, 28(1), 1–19. <https://doi.org/10.1108/IJOA-04-2018-1400>
- Rahman, F. (2020). Dakwah dan pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 40(1), 67–82. <https://doi.org/10.21580/jid.v40i1.5678>
- Rakhmat, J. (1991). *Islam aktual: Refleksi sosial seorang cendekiawan Muslim*. Mizan.
- Rofiq, A. (2020). *Identitas keislaman di era globalisasi*. UII Press.
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir tematik atas pelbagai persoalan umat*. Mizan.
- Sinthia, I., Nugroho, H., & Prasetyo, B. (2024). Leadership and organizational performance: Evidence from Islamic organizations. *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, 15(2), 101–115. <https://doi.org/10.29244/jmo.v15i2.67890>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Syarifuddin, S., Rahmatullah, & Hidayat, T. (2023). Transformasi paradigma dakwah di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 8(1), 55–70. <https://doi.org/10.15408/jmd.v8i1.9876>
- Wahidin, D. (2022). Dakwah struktural sebagai strategi perubahan sosial. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 7(2), 120–135. <https://doi.org/10.15575/jpmi.v7i2.3456>
- Yusuf, M., & Karim, A. (2023). The role of da'wah institutions in social transformation. *Journal of Islamic Social Studies*, 12(1), 33–48. <https://doi.org/10.22373/jiss.v12i1.4567>
- Zulkarnain, Z. (2021). Paradigma dakwah dalam perspektif modern. *Jurnal Studi Islam*, 9(2), 89–104. <https://doi.org/10.29240/jsi.v9i2.2345>